

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)
TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Bangun Praja, Banjarbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas izin dan karunianya jualah penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan tahun 2017 ini disusun sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan pada penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini, dan kami mengharapkan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh segenap jajaran aparatur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memberikan manfaat bagi peningkatan investasi yang pada akhirnya sebagai pengantar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Banjarbaru, September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

IR. H. NAFARIN, MP

Pembina Tk.I

NIP. 19620513 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	
BKPMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4
2.1 Tugas Pokok	4
2.2 Fungsi.....	4
2.3 Struktur Organisasi.....	5
 BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN	
LALU.....	7
 BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN	
RENCANA KERJA	11
4.1 Tujuan	11
4.2 Sasaran	11
4.3 Program dan Kegiatan	13
 BAB V PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 072 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- f. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- g. Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan rencana Kerja (renja perubahan) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Perubahan.

BAB II. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Memuat uraian tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN BERJALAN

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 sampai dengan triwulan II tahun 2017 (berjalan/ terakhir) .

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2017, pergeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

BKPMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

2.1. Tugas Pokok

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.2. Fungsi

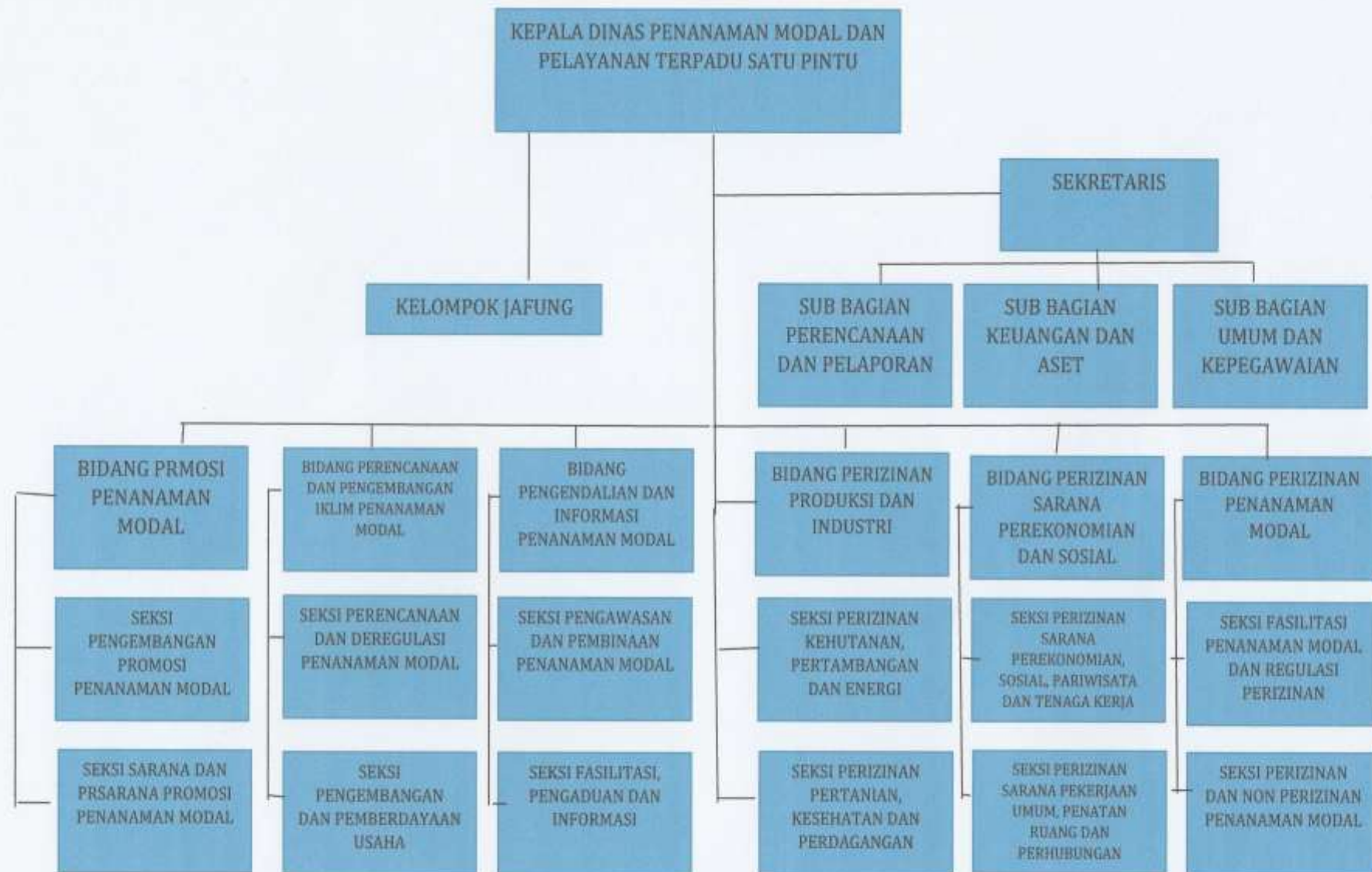
Adapun fungsi Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal
- d. Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri
- f. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial
- g. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal
- h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

2.3. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian :
 - i. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - iii. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- c. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Sarana Promosi Penanaman Modal
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim penanaman terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Fasilitasi, Pengaduan, dan Informasi
- f. Bidang Perizinan Produksi dan Industri terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi
 - ii. Sub Bidang Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan
- g. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial terdiri dari 2 sub bidang :
 - i. Sub Bidang Perizinan Sarana Perekonomian, Sosia, Pariwisata, dan Tenaga Kerja
 - ii. Sub Bidang Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
- h. Bidang Perizinan Penanaman Modal terdiri dari 2 sub bidang
 - i. Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - ii. Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN BERJALAN

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Pada anggaran tahun 2017 telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II (bulan Juli) dan terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijalankan berkaitan dengan perubahan kebijakan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja, yaitu sebagai berikut :

- I. Tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu sampai dengan Bulan Agustus 39.93% Tahun anggaran 2017. Adapun matrik terlampir.

Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat SILPA, sehingga akan dilakukan *refocussing* anggaran. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 ini akan mengalami pergeseran untuk penyesuaian dan perbaikan kinerja.
- II. Triwulan II pada bulan Agustus tahun 2017, adapun rincian pada tabel terlampir.

Melihat kepada peluang dan kendala dalam mewujudkan dan mendorong pengembangan usaha investasi serta peningkatan informasi penanaman modal dalam rangka peningkatan minat investasi di Kalimantan selatan melalui pengembangan sektor unggulan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Perencanaan yang matang
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi yang dapat memberikan informasi, dibutuhkan para calon investor
- c. Terciptanya hubungan baik dan saling menguntungkan antara investor dan Pemerintah daerah
- d. Peningkatan sarana dan prasarana
- e. Meningkatkan SDM baik ditingkat provinsi maupun Kab/Kota
- f. Meningkatkan mutu layanan
- g. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian

Untuk Mewujudkan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan program sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- f. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- g. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan publik
- h. Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan perizinan

Berdasarkan kebijakan dan program tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun rencana kerja sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sumber daya manusia (SDM)
- b. Melaksanakan pengumpulan data, penyusunan program dan rencana kerja serta koordinasi penanaman modal di daerah

- c. Melaksanakan kegiatan informasi Penanaman modal bagi kalangan dunia usaha
- d. Pelaksanakan kegiatan pembinaan kerjasama investasi dan kemitraan usaha potensial
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan, identifikasi potensi, penyusunan profil investasi, komoditi unggulan serta pelaksanaan promosi potensi daerah.
- f. Melaksanakan pengajian pengembangan investasi dan penilaian atas realisasi pelaksanaan penanaman modal di daerah
- g. Pembinaan mengenai persetujuan, perijinan dan fasilitas penanaman modal
- h. Melaksanakan pengendalian penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN
- i. Mengadakan rapat dengan perusahaan PMA/PMDN
- j. Orientasi lapangan proyek PMA/PMDN
- k. Pembinaan dan bantuan konsultasi teknis secara langsung bagi PMA/PMDN baik dalam perencanaan proyek maupun operasional
- l. Konsultasi dalam rangka Rakor teknis tentang pemberian perijinan dan fasilitasi
- m. Mengikuti Rakor penanaman modal, pembahasan perijinan dan fasilitasnya
- n. Mengadakan Rakor Teknis pemberian perijinan tingkat prov/Kab/Kota
- o. Evaluasi dan identifikasi perusahaan

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

4.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka perlu dipertimbangkan adanya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Perizinan selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

1. Tujuan

Adapun Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada **Misi 5**

Misi 5

Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Tujuan

Meningkatkan daya saing Perekonomian

Sasaran

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa serta Meningkatnya Investasi dalam Aktivitas Perekonomian

Strategi

Pengembangan Investasi baik Usaha Industri Kecil maupun Besar

Indikator

- **Realisasi Investasi PMA dan PMDN**
- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki indikator kinerja yang berujung pada realisasi investasi di daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara sasaran utama dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	8,1 Trilyun Rupiah
		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	15%
2.	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"B"
3.	Peningkatan Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	("BB")

4.3. Program dan Kegiatan

Tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2018 yakni : " Memacu Investasi melalui Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan Berdaya Saing menuju Kalsel Mapan." Dengan 13 Prioritas pembangunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung prioritas ke-12 yakni Kalsel menuju daerah industri, perdagangan, dan jasa.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan 2 (dua) program prioritas urusan penanaman modal yang didukung dengan program kesekretariatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas PM dan PTSP mempunyai kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pelayanan Penanaman Modal
- b. Pengembangan dan pemberdayaan usaha

- c. Penyelenggaraan Pameran Investasi
- d. Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah
- e. Pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal
- f. Perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat
- g. Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi
- h. Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force dalam rangka Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi
- i. Evaluasi RUPM
- j. Sosialisasi perizinan
- k. Rapat Koordinasi teknis bidang perizinan
- l. Peninjauan lapangan untuk syarat penerbitan izin
- m. Program Kegiatan Kesekretariatan

Pada perubahan rencana kerja tahun anggaran 2017 ini akan dilakukan *refocussing* anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut dengan tujuan peningkatan kinerja SKPD.. Anggaran pada kegiatan tersebut dilakukan pergeseran untuk kegiatan prioritas lainnya.

Disamping itu juga terdapat beberapa kegiatan tambahan sebagai penunjang kinerja SKPD. Kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- g. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Penambahan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dasar kegiatan : Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 76/B.3/A.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal 2017 Guangdong 21st Maritim Silk Road International Expo

- h. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan

- i. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- j. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penyesuaian anggaran belanja dan tambahan Belanja modal Mesin Absensi, Mesin Pompa air, Mesin Pembersih Mobil, Vacuum Cleaner.
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Penyesuaian anggaran belanja dan tambahan Pemeliharaan Renovasi dan perbaikan gedung kantor
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- m. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- n. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
- o. Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal
- p. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
- q. Penyelenggaraan Pameran Investasi
- r. Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi daerah
- s. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
- t. Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan
- u. Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001
- v. Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial se Kalsel
- w. Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri
- x. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri

Adapun perubahan rencana kerja disertai kebutuhan pendanaan dan target capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2017 terlampir.

BAB V

PENUTUP

Perjanjian dan kesepakatan internasional terkait perdagangan bebas, kini gencar dilakukan, oleh pemerintah tanpa pernah mencoba melihat dampak yang akan ditimbulkan. Indonesia sendiri telah menyepakati area perdagangan bebas, diantaranya : asean free trade Agreement (AFTA), Indonesia – Jepang EPA, Asean – China FTA, Asean – Korea FTA. Sedangkan yang masih dalam tahap perundingan adalah Asean – India FTA, Asean – EU FTA, Asean – Australia – New Zealand FTA. Sementara zona perdagangan bebas antara Indonesia – AS FTA dan Indonesia – EFTA (Swis, Leichestein, Norwegia dan Island), Masih dalam proses Pra-negosiasi dan joint study group. Salah satu yang menyita banyak perhatian hari ini adalah kesepakatan zona perdagangan bebas antara persekutuan negara-negara asean (termasuk Indonesia), dengan china upaya mengatasi dampak perdagangan bebas terhadap perkembangan investasi memerlukan upaya maksimal dari seluruh sektor terkait dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kondisi keamanan dalam negeri serta upaya memulihkan kepercayaan para investor terhadap iklim investasi di daerah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, antara lain diperlukan sumber daya manusia yang handal serta prasarana dan sarana yang mendukung harus lebih dahulu dibenahi dan dilengkapi.

Pelimpahan kewenangan penanaman modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan pentahapan-pentahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Terlaksana rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan ditingkat Provinsi serta tersedianya anggaran yang memadai.

Banjarbaru, Oktober 2017
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ir. H. Nafarin, MP

Pembina Tk I

NIP. 19620513 198903 1 011

**REKAPITULASI USULAN REVISI / PERUBAHAN DPA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP ABPD 2017
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	PERUBAHAN	KETERANGAN
	2,10,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	2,10,01,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	15.500.000	(9.500.000)	
2	2,10,01,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	695.416.000	426.416.000	(269.000.000)	
3	2,10,01,08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	230.000.000	205.000.000	(25.000.000)	
4	2,10,01,11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000	132.000.000	42.000.000	
5	2,10,01,12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	85.000.000	50.000.000	
6	2,10,01,16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	405.560.000	330.560.000	(75.000.000)	
7	2,10,01,18	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000.000	1.174.000.000	124.000.000	Penambahan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Dasar kegiatan: surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 76/B.3/A.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 perihal 2017 Guangdong 21st Maritim Silk Road International Expo
8	2,10,01,34	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	282.840.000	282.840.000	-	

	2,10,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
9	2,10,02,07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	310.000.000	193.000.000	(117.000.000)	
10	2,10,02,09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	107.000.000	77.000.000	(30.000.000)	Penyesuaian anggaran belanja dan Tambahan Belanja Modal Mesin Absensi, Mesin Pompa Air, Mesin Pembersih Mobil, Vacum Cleneer
11	2,10,02,15	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	250.000.000	371.572.000	121.572.000	Penyesuaian anggaran belanja dan Tambahan Pemeliharaan Renovasi dan Perbaikan Gedung Kantor
12	2,10,02,17	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	363.190.000	388.190.000	25.000.000	
13	2,10,02,21	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	140.000.000	161.000.000	21.000.000	
14	2,10,02,28	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	223.405.000	315.333.000	91.928.000	Tambahan Belanja Modal Pembuatan Kanopi
	2,10,06	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				

15	2,10,06,15	Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	120.000.000	120.000.000	-	
	2,10,15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
16	2,10,15,06	Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	300.000.000	300.000.000	-	
17	2,10,15,10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	1.700.000.000	1.700.000.000	-	
18	2,10,15,12	Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	400.000.000	400.000.000	-	
19	2,10,15,14	Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	350.000.000	350.000.000	-	
	2,10,16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
20		Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan		300.000.000	300.000.000	
	2,10,18	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik				
21	2,10,18,01	Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001	336.550.000	336.550.000	-	
	2,10,19	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan				
22	2,10,19,01	Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial se	50.500.000	70.500.000	20.000.000	

		Kalsel				
23	2,10,19,02	Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	100.000.000	130.000.000	30.000.000	
24	2,10,19,05	Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	150.000.000	150.000.000	-	
		JUMLAH			300.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2017 PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Sasaran Strategis	Urusan dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2017		Rencana Kerja Tahun 2017 Perubahan		Ket.
					Target capaian kinerja	Jumlah	Target Capaian Kinerja	Jumlah	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SOPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat	100%	25.000.000		15.500.000	
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Kalimantan Selatan	terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	695.416.000		426.416.000	
		penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi Kalimantan Selatan	tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	202.800.000		202.800.000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	230.000.000		205.000.000	

		penyediaan alat tulis kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	110.000.000		110.000.000	
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	90.000.000		132.000.000	
		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	35.000.000		85.000.000	
		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	100.500.000		100.500.000	
		Penyediaan Bahan Logistis Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	12 Bulan	405.560.000		330.560.000	
		penyediaan makanan dan minuman	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	12 Bulan	356.510.000		356.510.000	
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana Jumlah Pegawai yang Administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	1.050.000.000		1.174.000.000	
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana Jumlah Pegawai yang Administrasi kepegawaiannya	100%	350.000.000		350.000.000	

				dilayani secara tertib					
		Penataan Perpustakaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	12 Bulan	58.856.000		58.856.000	
		Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Provinsi Kalimantan Selatan	tersedianya jasa teknis perizinan	12 Bulan	282.840.000		282.840.000	
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Aset yang tercatat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Aset yang diadakan	100%	310.000.000		193.000.000	
		pengadaan peralatan gedung kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Aset yang diadakan	100%	107.000.000		77.000.000	Penyesuaian anggaran belanja dan tambahan belanja modal mesin absensi, mesin pompa air, mesin pembersih mobil, vacum cleaner

		pengadaan komputer	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Aset yang diadakan	100%	100.000.000		100.000.000	
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	363.190.000		388.190.000	
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	250.000.000		371.572.000	Penyesuaian anggaran belanja dan tambahan pemeliharaan renovasi dan perbaikan gedung kantor
		pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	140.000.000		161.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	223.405.000		315.333.000	Tambahan belanja modal pembuatan kanopi
	Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang Paham	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang Paham	100%	300.000.000		300.000.000	

	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP Persentase aset yang tercatat Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
		penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	7 Dokumen	120.000.000	BB BB 6 dokumen	120.000.000	
	Nilai Persetujuan / Rencana Investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
		Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	2 Kemitraaan	300.000.000	2 Kemitraaan	300.000.000	
		penyelenggaraan pameran investasi	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan Jumlah Pelaksanaan Pameran Investasi	9 Kali	1.700.000.000	12 Potensi 9 kali	1.700.000.000	

		Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Item Bahan Promosi Investasi Jumlah Sektor Potensi Investasi yang teridentifikasi	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	
		Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan penanaman modal Persentase Kab/Kota yang mengimplemntasi kan SIPISE terkait perizinan Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal	2 Kali Kab/Kota	278.780.000	2 Kali Kab/Kota	278.780.000	
		Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Inventarisasi dan Updating data SIPID, Investasi, Periznan dan Non PerizinanKab/Kot a yang telah menggunakan SIPID dan SIPIPISE terkait LKPM	2 Kali Kab/Kota	350.000.000	2 Kali Kab/Kota	350.000.000	

		Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Rekomendasi hasil Forum yang ditindaklanjuti			100%	300.000.000	
	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
		Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Rekomendasi hasil Rakor yang ditindaklanjuti	100%	264.150.000	100%	264.150.000	
		Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	86 BAP	391.871.000	86 BAP	391.871.000	
		monitoring dan evaluasi investasi daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) yang melaksanakan kegiatannya	86 Perusahaan	338.780.000	86 Perusahaan	338.780.000	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik							
		Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001	Provinsi Kalimantan Selatan	ISO 9001	1 Dokumen	336.550.000	1 Dokumen	312.550.000	
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Provinsi Kalimantan Selatan	Survey dan tersusunnya Dokumen IKM	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000	

	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan							
		Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial se Kalsel	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah masyarakat (sasaran) yang menerima sosialisasi Jumlah pelaksanaan sosiaslisasi		50.500.000	5 kali	70.500.000	
		Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah masyarakat (sasaran) yang menerima sosialisasi Jumlah pelaksanaan sosiaslisasi		100.000.000	2 kali	130.000.000	
		Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi Terkait Kab/Kota se Kalsel	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertambangan, Energi, Kehutanan		56.000.000	2 kali	56.000.000	

		Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertambangan, Energi, Kehutanan		150.000.000	12 bulan	150.000.000	
		Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi Terkait Kab/Kota se Kalsel	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan		50.000.000	2 kali	50.000.000	
		Aplikasi dan sistem Informasi Pengelolaaan Perizinan Secara Online	Provinsi Kalimantan Selatan	Aplikasi Perizinan		498.530.000	1 paket database	498.530.000	
		Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana pEreconomian dan Sosial	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertambangan, Energi, Kehutanan		114.500.000	12 bulan	114.500.000	
						11.334.738.000		11.610.738.000	

**REKAPITULASI USULAN REVISI / PERUBAHAN DPA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP ABPD 2017
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	PERUBAHAN	KETERANGAN
	2,10,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	2,10,01,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	15.500.000	(9.500.000)	
2	2,10,01,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	695.416.000	426.416.000	(269.000.000)	
3	2,10,01,08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	230.000.000	205.000.000	(25.000.000)	
4	2,10,01,11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000	132.000.000	42.000.000	
5	2,10,01,12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	85.000.000	50.000.000	
6	2,10,01,16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	405.560.000	330.560.000	(75.000.000)	

7	2,10,01,18	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000.000	1.174.000.000	124.000.000	Penambahan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Dasar kegiatan: surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 76/B.3/A.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 perihal 2017 Guangdong 21st Maritim Silk Road International Expo
8	2,10,01,34	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	282.840.000	282.840.000	-	
	2,10,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
9	2,10,02,07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	310.000.000	193.000.000	(117.000.000)	
10	2,10,02,09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	107.000.000	77.000.000	(30.000.000)	Penyesuaian anggaran belanja dan Tambahan Belanja Modal Mesin Absensi, Mesin Pompa Air, Mesin Pembersih Mobil, Vacuum Cleaner
11	2,10,02,15	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	250.000.000	371.572.000	121.572.000	Penyesuaian anggaran belanja dan Tambahan Pemeliharaan Renovasi dan Perbaikan Gedung Kantor

12	2,10,02,17	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	363.190.000	388.190.000	25.000.000	
13	2,10,02,21	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	140.000.000	161.000.000	21.000.000	
14	2,10,02,28	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	223.405.000	315.333.000	91.928.000	Tambahan Belanja Modal Pembuatan Kanopi
	2,10,06	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
15	2,10,06,15	Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	120.000.000	120.000.000	-	
	2,10,15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
16	2,10,15,06	Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	300.000.000	300.000.000	-	
17	2,10,15,10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	1.700.000.000	1.700.000.000	-	
18	2,10,15,12	Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	400.000.000	400.000.000	-	
19	2,10,15,14	Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	350.000.000	350.000.000	-	
	2,10,16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
20		Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan		300.000.000	300.000.000	
	2,10,18	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik				
21	2,10,18,01	Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001	336.550.000	336.550.000	-	
	2,10,19	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan				
22	2,10,19,01	Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial se Kalsel	50.500.000	70.500.000	20.000.000	

23	2,10,19,02	Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	100.000.000	130.000.000	30.000.000	
24	2,10,19,05	Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	150.000.000	150.000.000	-	
		JUMLAH			300.000.000	